



**FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN  
UNTUK PENGEMBANGAN  
PERKOTAAN BERKELANJUTAN**



## Daftar Isi

A. Latar Belakang .....	1
B. Konsep Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Urban Development</i> ) .....	5
C. Inovasi Pembangunan Perkotaan yang Berorientasi Keberlanjutan .....	9
D. Forum Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan.....	12
E. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan .....	13
F. Masa Depan Perkotaan Kita .....	16



## A. Latar Belakang

Perkotaan merupakan pusat peradaban manusia yang berkembang secara dinamis dan tumbuh sebagai konsentrasi penduduk, prasarana dan sarana, kegiatan sosial dan ekonomi, serta inovasi. Secara alami perkotaan tumbuh dengan kecepatan yang jauh meninggalkan wilayah sekitarnya, menyisakan persoalan disparitas tingkat perkembangan wilayah.

Seiring dengan kecenderungan yang umum terjadi di dunia, Indonesia mengalami proses urbanisasi di mana semakin banyak penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan sejalan dengan pertumbuhannya. Dalam kurun waktu 2005-2030 jumlah penduduk perkotaan di dunia diperkirakan akan meningkat 56%, di Asia naik 71%, dan di Indonesia naik 74%. Pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai lebih dari 107.9 juta jiwa<sup>1</sup>, di mana 20% di antaranya berada di Jabodetabek. Laju pertumbuhan penduduk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, atau Semarang ternyata relatif rendah yaitu 0.16% sampai dengan 0.90 % per tahun, namun terjadi peningkatan yang cukup besar di daerah-daerah *sub-urban*. Tangerang dan Bekasi mempunyai laju pertumbuhan sebesar 4.16%, sedangkan Sidoarjo 3%<sup>2</sup>.

Kondisi di atas menggambarkan tekanan yang besar di kawasan sekitar metropolitan dalam menampung luberan kegiatan. Dengan kata lain, telapak ekologis (*ecological footprint*) kawasan perkotaan telah sedemikian tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap wilayah sekitarnya yang secara langsung memicu perkembangan secara menjaral (*sprawling*) mengikuti jaringan infrastruktur jalan, konversi lahan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun, dan inefisiensi infrastruktur.

Perkembangan kawasan perkotaan yang sedemikian cepat tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas pemangku kepentingan untuk mempertahankan kualitas lingkungan kehidupan perkotaan. Penyediaan prasarana dan sarana hampir selalu tertinggal oleh perkembangan permasalahan yang terjadi. Kemampuan pengelola perkotaan dalam memahami permasalahan yang timbul dan merumuskan upaya pemecahannya belum juga menunjukkan hasil positif yang mengarah pada perbaikan kualitas lingkungan perkotaan. Saat ini sangat sulit menemukan perkotaan yang perkembangannya diindikasikan oleh hal-hal positif. Indikator

<sup>1</sup>ADB, Urbanization and Sustainability in Asia, (UNDP, Human Development Report 2006

<sup>2</sup>(Tommy Firman,2002)



perkembangan yang kasat mata dan mudah dikenali justru hal-hal yang tidak semestinya terjadi seperti berkurangnya ruang terbuka hijau, kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, polusi, pengelolaan limbah yang tidak tuntas, serta sifat individualistis masyarakatnya.

Kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia pada umumnya rentan terhadap bencana seperti gempa, tsunami, banjir, dan kebakaran. Hal ini tidak terlepas dari rendahnya perhatian pemangku kepentingan terhadap upaya mitigasi dan adaptasi yang saat ini makin relevan sehubungan dengan fenomena pemanasan global dan perubahan iklim.

Sebagaimana dipahami, kawasan perkotaan merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca sebagai konsekuensi dari tingginya populasi dan intensitas kegiatan yang berbanding lurus dengan pemanfaatan energi. Namun hal ini sebenarnya dapat dikurangi seandainya pengelolaan kawasan perkotaan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti pengaturan peruntukan ruang yang lebih efisien, penyediaan transportasi massal, penerapan rekayasa bangunan hemat energi, serta meminimalkan sampah melalui gerakan 3R (*reduce, reuse, recycle*). Fakta yang ada, perkotaan di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sebagai contoh, RTH publik yang tersedia saat ini di berbagai kota pada umumnya di bawah 10% (sangat jauh dari ketentuan UU No. 26/2007 sebesar 20%), sementara kota-kota di negara lain menargetkan luas RTH publiknya di atas 30% pada tahun 2020.

Permasalahan perkotaan tidak terbatas pada hal-hal terkait lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Saat ini kawasan perkotaan di Indonesia masih menghadapi persoalan demografi seperti migrasi penduduk yang terus meningkatkan populasi, segregasi sosial, dan kemiskinan.

Berbagai permasalahan di atas telah menimbulkan fenomena *urban paradox* yang bersifat dualistik (ironis). Di satu sisi perkotaan merupakan sumber peradaban dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, namun di sisi lain kawasan perkotaan



merupakan sumber permasalahan seperti kemiskinan, kemacetan, kekumuhan, dan bencana.

Permasalahan-permasalahan tersebut juga memiliki keterkaitan satu sama lain dan bersifat sistemik, sehingga pemecahannya pun tidak dapat dilakukan dengan secara parsial (*fragmented*). Pemecahan berbagai permasalahan perkotaan harus dilakukan dengan pendekatan holistik (terintegrasi).

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah mengarahkan pembangunan perkotaan yang dapat menyejahterakan masyarakat, baik masyarakat yang tinggal dan bekerja di dalamnya maupun masyarakat di wilayah sekitarnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan perkotaan harus serasi dan selaras dengan pembangunan kawasan perdesaan di sekitarnya. Pembangunan perkotaan harus benar-benar menjadi dorongan bagi perkembangan kawasan perdesaan; bukan memberikan tekanan, menguras sumber daya alam, atau memiskinkan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan perkotaan dapat meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan kehidupan masyarakat serta menjamin adanya pembangunan yang berkelanjutan.

Kebutuhan akan perkotaan yang berkelanjutan telah mulai menjadi isu publik ketika akhir-akhir ini kita semakin sering mengalami berbagai bencana yang terkait dengan rusaknya lingkungan (ekosistem) kehidupan manusia, seperti: banjir musiman, tanah longsor, kekeringan, pencemaran sungai dan sebagainya.

Secara sosial-ekologis, keberlanjutan suatu perkotaan pada prinsipnya sangat tergantung pada komitmen sosial warganya untuk menjaga keseimbangan antara pendayagunaan dan pola konsumsi, konsumsi, atau eksploitasi sumber-sumber alam dengan daya dukung alam dan teknologi memulihkan kerusakan alam dan mendayagunakan sumber-sumber yang terbarukan. Sumber daya yang sering dijadikan alat ukur antara lain adalah: air, tanah, pangan, dan energi.

Ketika ilmu politik-ekonomi telah mengungkapkan kegagalan pemerintah (*government failure*), saat kinerja layanan publik yang tidak efisien, lamban dan



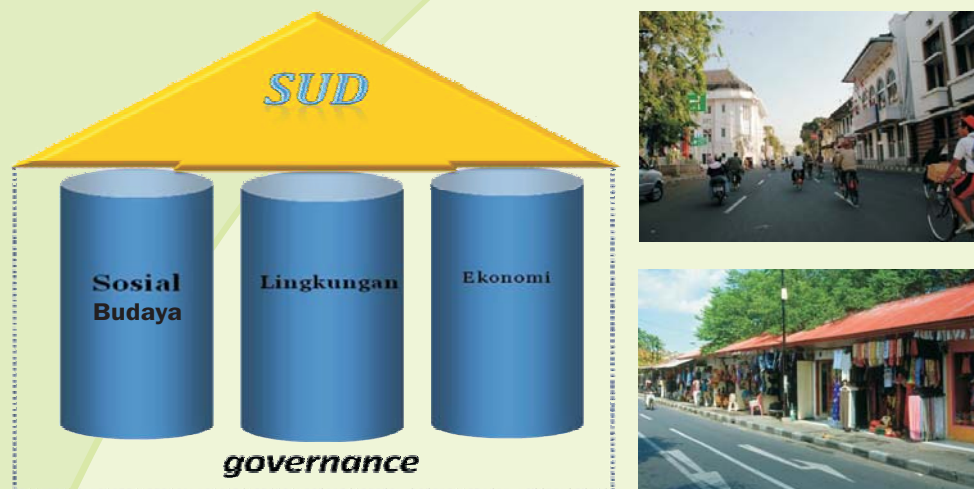
birokratis – akibat *over regulated* market serta kegagalan pasar (*market failure*), saat muncul sistem nilai ekonomi yang lebih berbasis pada aspek psikologis pelaku pasar, bukannya nilai riil barang/jasa – akibat kurangnya regulasi dan pembiaran terjadinya asimetri informasi, maka mungkin sudah saatnya hadir pendekatan baru yang menyeimbangkan peran dan pengaruh para pihak dalam tata kelola urusan publik (*“Government Failure vs Market Failure: Principles of Regulation”, Joseph E. Stiglitz, 2008*).



## B. Konsep Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (*Sustainable Urban Development*)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial<sup>3</sup>.

Sedangkan sebuah perkotaan yang berkelanjutan adalah sesuatu yang dapat dipelihara secara tidak pasti tanpa pengurangan yang berkembang dari kualitas yang bernilai di dalam dan di luar kota. Diharapkan dari sebuah pembangunan perkotaan yang berkelanjutan adalah sesuatu yang dapat dipelihara secara tidak pasti tanpa pengurangan yang berkembang dari kualitas yang bernilai di dalam dan di luar daerah di mana pembangunan sedang berjalan<sup>4</sup>



Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki tahap-tahap dari yang paling sederhana (perhatian terbatas pada aspek lingkungan/ekologi) hingga yang paling berkembang (mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan aspek pelestarian budaya) sebagaimana dalam matriks di halaman berikut.

<sup>3</sup> Brundtland Report (1987).

<sup>4</sup> Wicaksono Sarosa, YPB/LEAD Associate Training Cohort 13, Jakarta, 23 April 2008



## Pemikiran Transformasi Keberlanjutan pada Pembangunan yang Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Sebelum Sustainable Development	Sustainable Development		
	FASE 1	FASE 2	FASE 3
<p><b>(Pertumbuhan)</b> <b><u>Produktivitas Ekonomi</u></b></p> <p>Sebagai objek utama pembangunan</p>	<p>➔</p> <p><b><u>Produktivitas Ekonomi</u></b></p> <p>dan</p> <p><b><u>Keberlanjutan Ekologis (Ecological Sustainability)</u></b></p> <p>Perlu dicapai dan diseimbangkan dalam proses pembangunan.</p>	<p>➔</p> <p><b><u>Produktivitas Ekonomi</u></b></p> <p>dan</p> <p><b><u>Keberlanjutan Ekologis (Ecological Sustainability)</u></b></p> <p>dan</p> <p><b><u>Keadilan Sosial</u></b></p> <p>Perlu dicapai dan diseimbangkan dalam proses pembangunan.</p>	<p>➔</p> <p><b><u>Produktivitas Ekonomi</u></b></p> <p>dan</p> <p><b><u>Keberlanjutan Ekologis (Ecological Sustainability)</u></b></p> <p>dan</p> <p><b><u>Keadilan Sosial</u></b></p> <p>Perlu dicapai dan diseimbangkan dalam proses pembangunan.</p> <p>Dan</p> <p><b><u>Pelestarian Budaya</u></b></p> <p>Perlu dicapai dan diseimbangkan dalam proses pembangunan.</p>

Sumber : Sarosa dalam Bunga Rampai Pembangunan Perkotaan di Indonesia dalam Abad 21, 2005





Dari matriks di atas dan berbagai literatur, pembangunan berkelanjutan memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu: sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi. Dari sudut pandang sosial, pembangunan perkotaan berkelanjutan, antara lain, dicirikan oleh kondisi berikut:

- a. konsistensi penegakan hukum, termasuk dalam penegakan rencana tata ruang;
- b. etika/moral dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. keadilan dan kesetaraan hak masyarakat;
- d. keamanan dan kenyamanan lingkungan kehidupan; dan
- e. ketaatan masyarakat terhadap peraturan.

Dari sudut pandang lingkungan, pembangunan perkotaan berkelanjutan dicirikan, antara lain, oleh kondisi berikut:

- a. terwujudnya keseimbangan ekologis berupa keseimbangan antara daerah terbangun dan RTH, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penggunaan sumber daya terbarukan, serta meminimalkan *ecological footprint* dan menghemat penggunaan sumber daya yang meliputi lahan, energi dan air;
- b. konservasi energi dan pengembangan energi alternatif;
- c. pembangunan fisik tidak mengakibatkan peningkatan limpasan air hujan (*zero run-off*), serta pola produksi dan konsumsi tidak mengakibatkan peningkatan volume sampah dan limbah (*zero waste*);
- e. tersedianya infrastruktur hijau, yakni infrastruktur untuk aktivitas yang tidak menimbulkan emisi/polusi seperti jalur pedestrian, jalur khusus sepeda, dan tersedianya sarana/moda transportasi hijau (*transit oriented transportation system*);
- g. penerapan konsep bangunan hijau (bangunan ramah lingkungan).

Secara ekonomi, pembangunan kawasan perkotaan yang berkelanjutan harus menjamin terciptanya lapangan kerja bagi masyarakatnya, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Ketiga pilar tersebut di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, untuk mencapai keberlanjutan pembangunan perkotaan secara sosial, suatu kota harus dapat mengakomodasi lapangan pekerjaan dan kesejahteraan



masyarakatnya. Selain itu, pencapaian keberlanjutan secara sosial harus ditunjang oleh solidaritas sosial, perumahan yang layak, lingkungan yang lestari, aksesibilitas dan mobilitas yang efisien, kualitas lingkungan yang layak huni, dan pemberdayaan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam konteks sosial, lingkungan, dan ekonomi memerlukan upaya peningkatan kepedulian para pemangku kepentingan serta kesepahaman platform dalam menjabarkan prinsip-prinsip *Sustainable Urban Development* dan dalam tahap selanjutnya diperlukan pula pilar tambahan yaitu *governance* (tata kelola) di mana tata kelola menyangkut bukan hanya pemerintah saja, tetapi bagaimana pemerintah berinteraksi dengan pihak-pihak non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha) yang makin meningkat kiprahnya dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep *Sustainable Urban Development* dan prinsip-prinsipnya harus terintegrasi dalam rencana tata ruang, rencana program dan pembiayaan, serta pedoman pengendalian pembangunan.





### C. Inovasi Pembangunan Perkotaan yang Berorientasi Keberlanjutan

Dalam pembangunan kawasan perkotaan, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan atau pendekatan baru yang dikembangkan untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. Inovasi pembangunan perkotaan sangat diperlukan sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi kawasan-kawasan perkotaan di Indonesia. Dengan demikian diperlukan upaya untuk mendorong pengembangan inovasi yang kontekstual, menjamin kesetaraan sosial, layak secara ekonomi, partisipatif, berkelanjutan, dan selaras dengan budaya masyarakat setempat.

Inovasi pengelolaan kawasan perkotaan tidak selalu identik dengan modernitas dan hendaknya tidak selalu bersumber dari pengalaman di negara lain yang lebih maju. Inovasi dapat bersumber dari kearifan lokal, termasuk praktik yang telah berlangsung di negara berkembang dan kawasan perdesaan (sebagai satu bentuk *trickle-up innovation*).

Berbagai permasalahan pembangunan perkotaan tidak dapat diselesaikan dengan perencanaan dan desain. *Planning and design are not enough!* Perlu penanganan menyeluruh sejak dari perencanaan, implementasi rencana, dan pengendalian yang tidak terbatas pada kawasan perkotaan namun harus mencakup pula *hinterland*-nya. Urbanisme harus menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan perkotaan.

Pada tahap perencanaan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, dokumen rencana harus mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, perwujudan masyarakat madani (*civil society*), pelestarian lingkungan alami dan lingkungan buatan, pelestarian iklim budaya, penciptaan daya kreatif, dan infrastruktur publik.

Pada tahap pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan (organisasi, tata kerja, SDM) dan perangkat pengaturan (regulasi) yang memadai. Dengan demikian pembangunan perkotaan dapat membentuk basis ekonomi yang kuat dengan tetap sensitif terhadap isu lingkungan dan sosial, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai strata sosial.



Untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembangunan perkotaan, diperlukan rekayasa sosial yang dimulai dari keluarga, sekolah dan komunitas, yang pada akhirnya dapat terwujud suatu masyarakat perkotaan madani. Masyarakat madani berciri produktif secara ekonomi, ramah terhadap lingkungan, adil secara sosial, berkembang secara budaya (beradab) dan bersifat partisipatif secara politik. Di samping itu, kepala daerah diharapkan dapat menjadi *political leader* yang visioner untuk mendorong pembangunan perkotaan sebagai sebuah proses yang inklusif yang melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat baik untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dapat diidentifikasi dari berbagai kearifan lokal yang justru semakin menghilang dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pasar tradisional merupakan media interaksi sosial ekonomi masyarakat yang sekaligus mampu mengakomodasi pelaku ekonomi informal, saat ini semakin terpinggirkan oleh kehadiran pasar modern dan *supermarket*.

Beberapa contoh praktek penerapan prinsip pembangunan perkotaan berkelanjutan pun sudah mulai berkembang, baik pada skala kecil maupun besar. Berikut adalah contoh praktik pada skala kecil:

**a. *Ecotourism* di Rawajati**

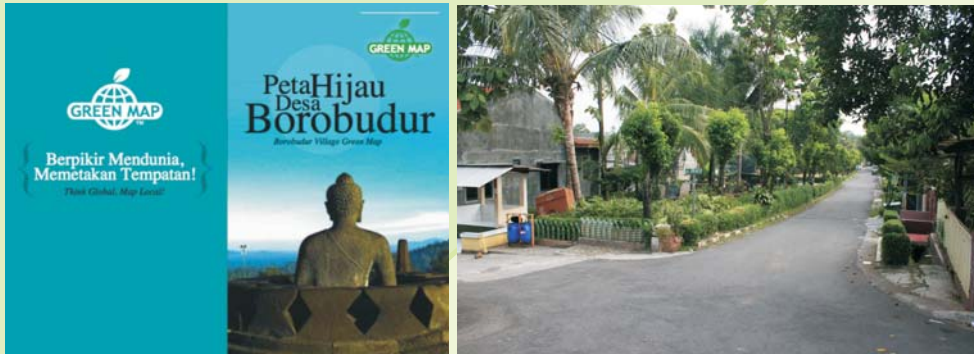
Dengan dimotori Kelompok PKK, masyarakat Kampung Rawajati (Jakarta) memulai inisiatif penghijauan sejak tahun 2001. Lima tahun kemudian, kampung Rawajati menjadi kampung tujuan wisata hijau di Jakarta, dan menghasilkan produk herbal jamu, bibit tanaman dan produk daur ulang plastik. Semua itu dimulai dari langkah sederhana dan inisiatif untuk menata lingkungan menjadi lebih baik.

**b. Peta Hijau Desa Borobudur**

Difasilitasi oleh Komunitas Peta Hijau Yogyakarta, masyarakat dusun di sekitar



Candi Borobudur memetakan 350 potensi lokal di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang tersebar di kawasan Candi Borobudur. Pembuatan peta hijau tersebut dimaksudkan untuk memaparkan Candi Borobudur sebagai sebuah ruang terbuka besar dengan segenap potensi positif dan negatif yang ada di dalamnya.



Penerapan pada skala yang lebih luas dilaksanakan oleh dunia usaha dalam pembangunan kawasan perkotaan baru. Karakter perkotaan baru yang dikembangkan swasta adalah sebagai jawaban pembangunan yang cenderung berkembang alami, dan tidak terarah. Pengembangan kota baru ini diupayakan untuk membangun kota yang lebih baik, baik dalam penyediaan utilitas, infrastruktur, lingkungan, dan berdaya saing.



## D. Forum Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan (Forum SUD)

Forum ini merupakan forum terbuka yang bisa diikuti oleh pemangku kepentingan perkotaan dan wujud suatu proses panjang yang lahir dari pemikiran pentingnya mewujudkan kehidupan perkotaan menjadi lebih baik. Adanya forum ini diharapkan mampu menjadi wadah fasilitasi untuk mengkomunikasikan permasalahan pembangunan kawasan perkotaan agar menjadi lebih baik, serta memberikan pemahaman serta penguatan kapasitas daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Forum pengembangan perkotaan berkelanjutan merupakan salah satu wadah berkumpulnya sekelompok orang (para pemangku kepentingan, baik individu maupun institusi) yang mempunyai perhatian pada berbagai masalah yang dihadapi oleh pengembangan perkotaan. Munculnya forum ini pada tahap awal sebagai bentuk keprihatinan para pemangku kepentingan terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh perkotaan umumnya, serta kepedulian terhadap upaya untuk mewujudkan pengembangan perkotaan yang berkelanjutan di masa mendatang.

Keberadaan forum pengembangan perkotaan berkelanjutan bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip *sustainable urban development* dalam pengelolaan perkotaan, baik pada tataran konsep, jakstra, maupun kegiatan (operasional). Ke depan, forum ini pada tataran nasional akan menjadi embrio *National SUD Facility* dan pada tataran regional akan terbentuk *Regional SUD Facility*.

Forum ini akan merumuskan konsep *sustainable urban development*, program kerja dan *action plan*, serta implementasi pengembangan perkotaan berkelanjutan melalui beberapa kegiatan *pilot project*.

Forum SUD dibentuk untuk:

1. Mengembangkan dan mengartikulasikan nilai-nilai baru dalam mewujudkan pengembangan perkotaan berkelanjutan.
2. menumbuhkan “*leaders*” dan wahana untuk pembelajaran serta menjadi agen-agen perubahan.
3. menjadi wadah partisipatif dan *action oriented*



## E. Peran Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan

Perwujudan pembangunan perkotaan berkelanjutan merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Pemerintah dengan segala keterbatasannya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang cenderung semakin meningkat kompleksitasnya. Di sisi lain, demokratisasi di segala bidang telah membuka ruang yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif di segala lini pembangunan. Untuk itu perlu diupayakan keseimbangan peran/tugas/fungsi, kewenangan, beban, pemasukan, kewajiban, hak, dan hubungan di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar tata kelola yang adil dan proporsional dapat diciptakan. Hal ini jelas perlu “regulasi” yang berbasis pada kesepakatan dan komitmen para pihak (pemangku kepentingan). Karena merupakan kesepakatan antar-pihak, maka regulasi baru ini akan mengikat para pihak secara lebih resiprokal. Hal demikian juga bisa diterapkan dalam proses pengambilan keputusan publik yang terkait dengan proses perencanaan, penganggaran serta pemantauan implementasi program-program pembangunan.

Dalam pelaksanaan regulasi dan implementasi program-program tersebut, peran pemangku kepentingan sangatlah penting dalam mengendalikan dan memastikan diterapkannya prinsip-prinsip bersama serta dijalankannya mekanisme *delivery* yang adil dan proporsional, karena di samping kualitas maka tersedianya akses ke ruang kontrol untuk pengambilan keputusan dan sistem *delivery* akan meningkatkan kepuasan terhadap layanan publik yang disediakan.

Karenanya dalam pengembangan kebijakan dan program untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan, tata kelola perkotaan yang ada harus memberi ruang berbagai pandangan masyarakat sipil dalam pengembangan “Kota untuk Semua” yang tanggap terhadap berbagai persoalan dan kebutuhan warganya. “Kota untuk Semua” yang merupakan prasyarat terwujudnya kota yang berkelanjutan harus dapat dikembangkan secara kolektif oleh warganya dan kemudian kota tersebut akan mewadahi kegiatan pengembangan diri warganya, atau dengan ungkapan lain dapat dikatakan “warga membentuk kotanya, kemudian kota membentuk warganya”.

Untuk mewujudkan kemitraan yang saling menguntungkan, diperlukan saling percaya antarpihak yang bermitra, dan untuk membentuk saling percaya diperlukan



pembentukan pemahaman bersama dan nilai bersama. Dengan adanya pemahaman dan nilai-nilai bersama, pihak-pihak yang terlibat akan terdorong untuk menyelenggarakan kegiatan bersama (*“Renewing Governance: Governing by Learning in the Information Age”*, Steven A. Rosell, 1999).

Peran pemerintah adalah sebagai regulator yang memampukan para pelaku, menjamin terjadinya tata kelola yang adil dan proporsional, serta penyedia layanan dasar perkotaan, kawasan-kawasan penyangga perkotaan (ruang terbuka hijau: taman, hutan kota, dan badan-badan air: sungai, danau/situ/bendung dll). Dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai *regulator* dan *enabler*, kepala daerah dapat memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong daya kreatif dalam pengelolaan kawasan perkotaan, baik di jajaran pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha.

Peran dunia usaha adalah sebagai motor pengembangan nilai tambah, peningkatan produksi dan distribusi, menyediakan layanan penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dan efisien, serta pembangun perkotaan yang nyaman, produktif, dan menarik untuk dikunjungi. Pengalaman selama ini menunjukkan pelaku dunia usaha memiliki potensi besar untuk mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan, antara lain, melalui penyediaan perumahan yang layak huni dan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peran masyarakat adalah sebagai pengguna sekaligus pembangun perkotaan melalui pengembangan permukiman yang sehat dan teratur, memelihara kebersihan dan penghijauan kawasan permukiman, menjaga keseimbangan penggunaan air tanah dengan membangun sumur resapan dll. Masyarakat sipil yang terorganisasi juga berperan sebagai sistem kontrol publik yang efektif melalui organisasi pemantauan kinerja pemerintah, kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif, dan berbagai pemikiran atau masukan kebijakan untuk mengembangkan tata kelola publik yang lebih baik.

Hal tersebut tentu tidaklah mudah dilakukan, karena perlu keberanian untuk membongkar dinding-dinding penyekat antarpihak dan antarsektor yang seringkali sangat kokoh karena diperkuat oleh *mental-block* yang membentuk *mind-set* para



pelakunya. Namun dengan niat awal bersama untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan bersama bangsa, dan dengan didasari *potisitive-thinking* semua pihak, serta keberanian untuk meninggalkan “zona kenyamanan” masing-masing, maka bukan tidak mungkin kita melakukan pembaharuan dalam pengelolaan perkotaan kita.





## F. Masa Depan Perkotaan Kita

Menilik berbagai permasalahan perkotaan yang dihadapi, tidak sedikit pihak yang pesimistis terhadap masa depan perkotaan di Indonesia. Namun bagaimana pun, kita harus terus melakukan perubahan untuk mewujudkan perkotaan yang lebih baik. Andress Duany telah mengingatkan "*The urban landscape is changing fast, but if Asia doesn't change course, its cities will be dark and dismal*". Bila kita tidak melakukan perubahan, maka perkotaan kita akan tidak layak huni.

Masa depan perkotaan Indonesia adalah sebuah perkotaan yang memiliki keseimbangan antar aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan tata kelola yang demokratis dan partisipatif. Secara sosial, kawasan perkotaan Indonesia masa depan adalah wadah bagi kehidupan warganya yang guyub dan menjunjung tinggi kearifan lokal, di mana budaya masyarakat madani mendapatkan tempat yang proporsional untuk berkembang. Masyarakat kawasan perkotaan dapat secara leluasa mengaktualisasikan nilai-nilai positif yang dianut dalam kehidupannya.

Lingkungan kawasan perkotaan Indonesia masa depan adalah lingkungan yang mampu memberikan kehidupan yang berkualitas, jauh dari bencana, dan memenuhi standar-standar kenyamanan (*amenity*) yang dapat mendorong produktivitas masyarakatnya. Lingkungan yang berkualitas juga akan mendorong warganya untuk terus melakukan inovasi untuk lebih meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupannya.

Perkotaan Indonesia masa depan adalah perkotaan yang berfungsi secara optimal sebagai kutub pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, yang tidak menguras sumber daya alam namun mendorong pembentukan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat kawasan perdesaan. Berbagai kelompok dan strata sosial masyarakat perkotaan senantiasa dapat menemukan ruang dan kesempatan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Tidak ada



kemiskinan, perbedaan yang ada tetap menunjukkan nilai-nilai keadilan.

Namun perlu disadari, masa depan perkotaan Indonesia adalah buah dari upaya yang kita lakukan sejak hari ini. Bila kita memperlakukan pengelolaan kawasan perkotaan sebagai “*business as usual*” gambaran masa depan perkotaan Indonesia adalah kondisi yang terbalik dari gambaran di atas. Lantas, apa yang perlu kita lakukan?

Orang bijak mengatakan, merubah pola pikir masyarakat adalah “bagai merubah arah laju sebuah tanker raksasa”. Namun siapa pun tahu, tanker raksasa tetap dapat dibelokkan. Yang diperlukan adalah sistem yang memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat semua pemangku kepentingan memahami konsep pembangunan perkotaan masa depan yang berkelanjutan. Semua individu, kelompok masyarakat, institusi swasta dan pemerintah, pembuat kebijakan, dan pengambil keputusan juga harus memahami peran apa yang seharusnya dimainkan. Untuk itu diperlukan upaya kampanye untuk menanamkan visi perkotaan masa depan sekaligus memberdayakan pemangku kepentingan agar dapat memainkan perannya secara optimal.

Peran optimal dari pemangku kepentingan tentu membutuhkan regulasi yang memadai. Untuk itu perlu disusun perangkat regulasi yang lengkap, jelas, konsisten, dan sinergis yang mengatur peran semua pihak di berbagai aras (kebijakan, strategi, program, dan kegiatan di semua tingkat pemerintahan). Agar regulasi dapat diterapkan secara efektif, diperlukan proses penyusunan yang demokratis dan partisipatif untuk menumbuhkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam penerapannya, di samping upaya penegakan yang tegas dan konsisten.



Visi perkotaan masa depan dan langkah-langkah untuk mewujudkannya perlu dilembagakan. Tidak hanya melalui upaya pelebagaan secara formal, tetapi yang lebih penting adalah melembagakan secara budaya (*cultural*), agar hal tersebut dapat tumbuh menjadi bagian dari budaya masyarakat. Untuk itu aspek pendidikan merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Generasi baru perlu dibentuk untuk memiliki budaya yang selaras dengan konsep pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui pendidikan sejak usia dini. Pendidikan dimulai dengan secara kontinyu mengajarkan hal sederhana seperti disiplin dan tertib dalam memilah dan membuang sampah. Materi pendidikan kemudian semakin ditingkatkan sejalan dengan bertambahnya usia. Pengalaman menunjukkan, pendidikan sejak usia dini dalam jangka panjang akan membentuk perilaku sebuah generasi.

Agenda-agenda besar di atas hanya dapat terwujud di bawah kepemimpinan yang kuat dan visioner. Kepala daerah harus mampu memainkan peran sebagai *political leader* yang mampu memimpin upaya pencapaian tujuan secara efektif dan mengarahkan pembangunan perkotaan sebagai sebuah proses yang inklusif dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda memahami peran yang dapat Anda mainkan untuk mewujudkan perkotaan masa depan yang kita inginkan?

Untuk mengefektifkan upaya peningkatan peran pemangku kepentingan, perlu dibentuk sebuah forum pemangku kepentingan. Forum ini merupakan media interaksi dan curah gagasan tentang konsep, program, hingga langkah nyata yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkotaan kita yang berkelanjutan. Forum ini hendaknya juga menjadi milik bersama, tidak terkesan sebagai forum para birokrat, pakar, atau kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya.



Efektifitas Forum Pengembangan Perkotaan Berkelanjutan dalam mengurus utamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada kesediaan anda untuk bergabung, berbagi pengalaman, merumuskan rekomendasi, dan melakukan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

*"It may be too late for some cities, but it's not too late for Asia"* dan yakinlah bahwa mewujudkan perkotaan yang berkelanjutan sama sekali bukan hal yang terlambat untuk Indonesia!!

